

**UPAYA PEMERINTAH TIONGKOK MENINGKATKAN EKONOMI
DIGITAL INDONESIA MELALUI KEBIJAKAN DIGITAL SILK**

ROAD TAHUN 2022-2024

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

Hengky Kurniawan

21323264

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

**UPAYA PEMERINTAH TIONGKOK MENINGKATKAN EKONOMI
DIGITAL INDONESIA MELALUI KEBIJAKAN DIGITAL SILK
ROAD TAHUN 2022-2024**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

Hengky Kurniawan

21323264

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Upaya Pemerintah Tiongkok Meningkatkan Ekonomi Indonesia Melalui Kebijakan Digital Silk Road Tahun 2022-2024

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal
Kamis, 24 Juli 2025

Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi



Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.
- 2 Ayu Heryati Naqsabandiyah, S.I.P., M.A.
- 3 Rizki Dian Nursita, S.I.P., M.H.I.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 24 Juli 2025



Hengky Kurniawan

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Cakupan Penelitian.....	5
1.5 Tinjauan Pustaka.....	6
1.6 Kerangka Pemikiran.....	10
1.7 Argumen Sementara.....	14
1.8 Metode Penelitian.....	15
1.1.1 Jenis Penelitian.....	15
1.1.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	16
1.1.3 Metode Pengumpulan Data.....	16
1.9 Sistematika Pembahasan.....	16
BAB 2.....	18
2.1. Ekonomi Digital Tiongkok: Skala, Pertumbuhan, dan Dominasi.....	19
2.2. Strategi Digital Silk Road (DSR) di Indonesia.....	22
BAB 3.....	30
3.1. Instrumen 1: Kebijakan Perdagangan di Era Digital.....	31
3.2. Instrumen 2: Kebijakan Investasi.....	34
3.3. Instrumen 4: Siber.....	38
3.4. Instrumen 5: Kekuatan Bantuan dan Pembangunan Kapasitas.....	41
3.5. Instrumen 6: Keuangan dan Moneter.....	42
BAB 4 PENUTUP.....	47
4.1 KESIMPULAN.....	47
4.2 REKOMENDASI.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Tujuh Instrumen Geoeconomics	11
Tabel 2.1. Investasi Infrastruktur Digital Pemerintah Tiongkok (2022-2024)	24
Tabel 2.2. Pilar Strategi Digital Silk Road Tiongkok di Indonesia (2022-2024)	25
Tabel 2.3. Pilar Strategi Geoekonomi Tiongkok dalam DSR	27
Tabel 2.4. Pilar Strategi dan Respons Digital Nasional Indonesia	38
Tabel 3.1. Operasionalisasi Instrumen Geoekonomi Blackwill & Harris dalam Konteks DSR	45

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Nilai Ekonomi Digital Indonesia per Tahun (2022-2024)	23
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Keuangan di Balik Digital Silk Road	21
---	----

DAFTAR SINGKATAN

DSR	: Digital Silk Road
BRI	: Belt and Road Initiative
PDB	: Produk Domestik Bruto
US	: United States (Dollar)
MoU	: Memorandum of Understanding
AI	: Artificial Intelligence
BPPT	: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
GMF	: Global Maritime Fulcrum
FDI	: Foreign Direct Investment
SOEs	: State-Owned Enterprises
IKN	: Ibu Kota Nusantara
SNI	: Standar Nasional Indonesia
EV	: Electric Vehicle
PP	: Peraturan Pemerintah
BSSN	: Badan Siber dan Sandi Negara
ITB	: Institut Teknologi Bandung
UGM	: Universitas Gadjah Mada
UI	: Universitas Indonesia
STEM	: Science, Technology, Engineering, and Mathematics
BI	: Bank Indonesia
PBoC	: People's Bank of China
LCS	: Local Currency Settlement
QRIS	: Quick Response Code Indonesian Standard
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

BUMN : Badan Usaha Milik Negara

SWF : Sovereign Wealth Funds

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis upaya geoekonomi pemerintah Tiongkok dalam meningkatkan ekonomi digital Indonesia melalui kebijakan *Digital Silk Road* (DSR) selama periode 2022-2024. Di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan mencapai USD 130 miliar pada 2025, kebijakan *Digital Silk Road* hadir sebagai akselerator sekaligus sumber tantangan strategis. Dengan menggunakan kerangka teori geoekonomi dari Robert Blackwill dan Jennifer Harris, penelitian ini mengidentifikasi bagaimana Tiongkok secara sistematis menerapkan tujuh instrumen kekuatan—kebijakan perdagangan, investasi, keuangan, sanksi (termasuk ketiadaannya), bantuan, siber, serta energi dan komoditas—untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Argumen utama penelitian ini adalah bahwa tindakan Tiongkok lebih merupakan upaya "membujuk" (*inducement*) daripada sekadar "mendukung" (*support*). Melalui investasi strategis pada infrastruktur kritis (pusat data Alibaba Cloud), akuisisi platform dominan (investasi ByteDance di Tokopedia), promosi standar teknologi (uji coba 5G Huawei), dan program pembangunan kapasitas masif (*Huawei ASEAN Academy*), Tiongkok secara bertahap mengikat Indonesia ke dalam ekosistem teknologi dan keuangannya. Temuan menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mendapatkan keuntungan signifikan berupa akselerasi infrastruktur dan pertumbuhan nilai ekonomi digital, dinamika ini menciptakan ketergantungan asimetris yang berisiko terhadap kedaulatan data dan kemandirian teknologi jangka panjang.

Kata Kunci: *Digital Silk Road*, Ekonomi Digital, Geoekonomi, Hubungan Indonesia-Tiongkok, Investasi Teknologi, Kedaulatan Digital

ABSTRACT

This research analyzes the geoeconomic efforts of the Chinese government in advancing Indonesia's digital economy through the Digital Silk Road (DSR) policy during the 2022-2024 period. Amidst the rapid growth of Indonesia's digital economy, projected to reach USD 130 billion by 2025, the Digital Silk Road Policy emerges as both an accelerator and a source of strategic challenges. Utilizing the geoeconomic theoretical framework by Robert Blackwill and Jennifer Harris, this study identifies how China systematically employs seven instruments of power—trade policy, investment, finance, sanctions (including their absence), aid, cyber, as well as energy and commodities—to achieve its national interests. The core argument of this research is that China's actions are more an act of "persuasion" than mere "support." Through strategic investments in critical infrastructure (Alibaba Cloud data centers), acquisition of dominant platforms (ByteDance's investment in Tokopedia), promotion of technological standards (Huawei's 5G trials), and massive capacity-building programs (Huawei ASEAN Academy), China gradually binds Indonesia into its technological and financial ecosystem. The findings indicate that while Indonesia gains significant benefits in infrastructure acceleration and digital economy growth, this dynamic creates an asymmetric dependence that poses risks to long-term data sovereignty.

and technological independence.

Keywords: Digital Economy, Digital Silk Road, Digital Sovereignty, Geoeconomics, Indonesia-China Relations, Technology Investment.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Program Kebijakan *Digital Silk Road* (DSR) diluncurkan pada tahun 2015 oleh pemerintah Tiongkok dengan tujuan meningkatkan hubungan komunikasi global dan mempercepat globalisasi perusahaan teknologi. Hingga saat ini, kebijakan *Digital Silk Road* telah diimplementasi banyak negara sepanjang rute *Belt and Road Initiative* (BRI). Tiongkok turut melihat potensi besar negara Indonesia dalam menjalin kerjasama terutama dalam transformasi ekonomi digital. Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi dan potensi PDB cukup besar di wilayah Asia Tenggara dianggap akan memainkan peran aktif dalam kontribusinya, dengan PDB Indonesia sebesar 1 Triliun *US Dollar* dan skala pasar perdagangan digital sebesar 7,1 miliar *US Dollar* dikombinasikan dengan populasi terbesar ke-4.

Indonesia sebagai negara berpotensi besar dalam pasar ekonomi digitalnya yang aktif diyakini mampu memainkan peran dalam program *Belt and Road Initiative* dan bergabung dalam implementasi kebijakan *Digital Silk Road* Tiongkok. Menurut *The Global Digital Economy Development Report 2021*, “Indonesia memiliki pasar ekonomi terbesar di Asia Tenggara, menyumbangkan 40% dari pasar Asia Tenggara dengan pertumbuhan ekonomi digital sebesar 9,6% per tahun. hal ini juga ditunjang atas keberadaan populasi pemuda yang begitu besar dan akses internet nya tinggi. Indonesia telah menjadi tujuan para investor global dengan aliran investasi sebesar 9,1 Miliar *US Dollar* pada sektor digital di

tahun 2021” (Sapulette and Muchtar 2023). Pada tahun 2022, sekitar 40% dari total nilai transaksi ekonomi digital berasal dari Indonesia, mencapai US\$77 miliar. “Pada tahun 2025 diperkirakan nilainya akan meningkat dua kali lipat menjadi US\$130 miliar” ujar Salahuddin (INDONESIA.GO.ID 2023).

Tiongkok dalam sektor pertumbuhan ekonomi digital tumbuh sebesar 9,6% dari tahun ke tahun dan menduduki peringkat pertama di dunia. Sehingga hal ini mendasari Tiongkok untuk melibatkan Indonesia dalam Program *Belt and Road Initiative* (BRI) khususnya pada era pemerintahan Xi Jinping. dengan tujuan ambisinya meningkatkan perdagangan global dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi di Asia dan sekitarnya melalui proyek infrastruktur dan investasi. *Belt and Road Initiative Program* merupakan proyek raksasa yang melintasi 3 benua yaitu Asia, Eropa, dan Afrika dan $\frac{3}{4}$ sumber energi dengan target 4.4 miliar populasi di 67 negara sehingga mewakili 63% dari total populasi global (Anam and Ristiyani 2018). Salah satu upaya dari Tiongkok melalui program *Belt and Road Initiative* dalam mengintegrasikan pasar internasional dan memperbesar pengaruhnya yaitu melalui kebijakan *Digital Silk Road* (DSR) yang memfokuskan pada empat sektor yang saling terkait dan berorientasi teknologi. Pertama, Tiongkok akan berinvestasi dalam infrastruktur digital melalui pusat data, kabel optik, dan jaringan seluler generasi berikutnya. Kedua, penekanan domestik untuk menciptakan teknologi canggih yang penting bagi kekuatan dan layanan ekonomi. Ketiga, mendorong Teknologi *5G*, *Big Data*, *Quantum Computing*, *Satellite Navigation System*, *Advanced Technology Artificial Intelligence*, *Cloud Computing*, dan *e-commerce* melalui zona perdagangan bebas virtual. Hal ini dikarenakan Tiongkok menyadari ketergantungan ekonomi digital dalam

mempengaruhi dunia internasional. Keempat, demi menciptakan lingkungan digital internasional yang ideal, diplomasi dan tata kelola digital yang sinergis perlu dilaksanakan melalui organisasi multilateral (Radita Gora Tayibnapis 2022).

Sehingga, sistem industri ekonomi digital Tiongkok dengan skenario dan penerapan yang cukup lengkap dalam mendorong pengaplikasian teknologi digital di bidang produksi diharapkan mampu memecahkan permasalahan pada perkembangan ekonomi digital terkhususnya di Indonesia. Kebijakan *Digital Silk Road* membawa investasi yang cukup substansial dalam infrastruktur digital Indonesia dimana hal ini menjadi bagian fundamental yang penting dalam pertumbuhan dan efisiensi *platform-platform* ekonomi digital di Indonesia. Sebagai proyek yang dinilai sebagai media mempromosikan liberalisme dan otoritarianisme. Penelitian ini berargumen bahwa, kebijakan *Digital Silk Road* telah berintegrasi dengan kebutuhan transformasi ekonomi digital Indonesia melalui pemerintah Tiongkok dan aktor domestiknya. Namun demikian, Kendala utama bagi Indonesia adalah memastikan kemandirian teknologi dan regulasi yang adaptif guna menavigasi tekanan geopolitik, sementara Tiongkok berupaya menjaga momentum investasi di tengah dinamika geopolitik dan proteksionisme global. Dengan demikian, tindakan Tiongkok lebih merupakan upaya “membujuk” (*inducement*) daripada sekadar “mendukung” dengan investasi pada infrastruktur digital kritis sebagai instrumen pentingnya, Tiongkok secara strategis mengikat Indonesia ke dalam ekosistem teknologinya. Bagi Indonesia, ini adalah katalisator pertumbuhan, sementara bagi Tiongkok, ini adalah cara mengamankan pengaruh dan pasar jangka panjang.

Tahun 2022 hingga 2024 menjadi sangat penting untuk diteliti dan didalami. Sebab, pada akhir tahun 2021 berdasarkan laporan Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, Koordinasi Usaha Mikro Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Tiongkok menggerakkan program kebijakan *Digital Silk Road* nya ke Indonesia secara luas pada setiap sektor. Khususnya aliran investasi yang berdatangan untuk mendukung pertumbuhan *5G Technology, Big Data, Quantum Computing, Satellite Navigation System, Advanced Technology Artificial Intelligence, Cloud Computing, e-commerce* di Indonesia.

Penetrasi ekonomi digital Tiongkok kepada Indonesia ditandatangani di Indonesia pada Juli 2022 dalam *Memorandum of Understanding* tentang peningkatan keamanan, internet, perdagangan *e-commerce*, logistik digital, dan kerjasama teknologi. MoU ini juga membahas kerja sama dalam pengembangan kota pintar, infrastruktur digital, dan pertukaran pengetahuan serta praktik terbaik antara kedua negara (INDONESIA.GO.ID 2022). Pada tahun yang sama Huawei mengumumkan bahwa pihaknya berkolaborasi dengan Badan Indonesia untuk Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada tiga bidang yaitu *Artificial Intelligence (AI), Cloud computing, and 5G Technology*. Kemudian turut terlibat juga Alibaba dalam percepatan dan pengembangan perdagangan elektronik atau *e-commerce* di Indonesia demi mencapai Indonesia Emas. Pemerintahan Presiden Joko Widodo memandang baik kolaborasi antara pihak dan industri teknologi Indonesia, pemerintah, dan universitas sebagai pusat pencapaian tujuan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana strategi Geoekonomi pemerintah Tiongkok dalam memperluas ekonomi digitalnya di Indonesia melalui Kebijakan *Digital Silk Road* pada tahun 2022-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Strategi pelaksanaan kebijakan *Digital Silk Road* pemerintah Tiongkok kepada pertumbuhan ekonomi digital Indonesia
2. Untuk mengetahui maksud dari upaya Tiongkok terhadap peningkatan ekonomi digital Indonesia melalui kebijakan *Digital Silk Road* melalui aktor penting dalam mengintegrasikan Indonesia dengan program kebijakan *Digital Silk Road* milik pemerintah Tiongkok.

1.4 Cakupan Penelitian

Fokus penelitian yang dibahas adalah kebijakan *Digital Silk Road* dengan cakupan wilayah yaitu Indonesia sebagai negara tujuan dan pemerintah Tiongkok sebagai pelaksana. Penelitian ini didasarkan atas pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang mampu tumbuh sebesar 9,1 Miliar US Dolar yang dicatat dalam laporan *The Global Digital Economy Development Report pada akhir tahun 2021*. Penetapan penelitian pada tahun 2022 diperkuat dengan adanya *Memorandum of Understanding* ekonomi digital antara Indonesia dan Tiongkok yang ditandatangani pada KTT G20 di Bali pada Juli 2022 (INDONESIA.GO.ID 2022). Pada tahun 2024 menjadi akhir dari penelitian ini untuk menangkap

dinamika dan dampak terkini sekaligus aktualitas dan ketersediaan data terakhir dari data pertumbuhan ekonomi digital Indonesia pada kuartal keempat tahun 2024. Penelitian ini akan terbatas pada lingkup kerja sama Ekonomi Digital Indonesia oleh Tiongkok dan menggunakan perspektif Tiongkok sebagai landasan kerangka pemikiran untuk menganalisis motif dan kepentingannya dalam menyepakati Digital Silk Road.

1.5 Tinjauan Pustaka

Berbagai penelitian mengenai hubungan yang terjadi antara suatu negara dengan suatu perusahaan multinasional serta bagaimana upaya meningkatkan kualitas ekonomi digital negaranya demi menarik investasi sudah banyak diteliti sebelumnya. Penelitian mengenai upaya kerja sama ekonomi digital yang terjadi antara Indonesia dan Tiongkok juga pernah dilakukan meskipun dengan menggunakan cakupan yang berbeda. Jurnal dan penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan cakupan topik dijadikan acuan dalam pembuatan penelitian ini. Berikut ini merupakan jurnal dan penelitian yang membahas mengenai topik yang memiliki kemiripan dengan penelitian sebagai berikut.

Pertama, jurnal yang dilakukan oleh, Kate Hannan dan Stewart Firth (2015) dalam *Journal of Contemporary China Vol. 24, No. 95* dengan judul “*Trading with the Dragon : Chinese trade, investment and development assistance in the Pacific Islands*”. Pada jurnal tersebut melihat adanya peningkatan keterlibatan Tiongkok dengan negara kepulauan Indo-Pasifik, khususnya dalam hal perdagangan, investasi, dan bantuan pembangunan. Penulis mengaji sifat dan perkembangan tujuan keterlibatan Tiongkok yang berkembang atas keterlibatan

Tiongkok dengan negara-negara pulau kecil di Indo-Pasifik. Disisi lain penulis jurnal tersebut juga banyak sekali membicarakan tentang bagaimana Investasi Tiongkok terhadap negara-negara Indo-Pasifik yang begitu minim. Bahkan dalam tulisannya disebutkan bahwa hubungan yang terjalin antara Tiongkok dan negara Indo-Pasifik berdampak kepada bagaimana ketergantungan negara-negara berkembang di regional tersebut atas investasi yang disalurkan dan kerentanan terhadap pengaruh eksternal. Meskipun jurnal yang dilakukan sudah membahas mengenai bagaimana bantuan pembangunan Tiongkok yang semakin meningkat di wilayah kepulauan Indo-Pasifik. Namun, objek negara yang digunakan tidaklah sama dengan negara yang dipilih pada penelitian yang saya lakukan, selain itu pada jurnal ini juga menggunakan konsep going global yang mana konsep tersebut membicarakan mengenai upaya Tiongkok mendapatkan akses ke sumber daya di negara kepulauan Indo-Pasifik. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian yang saya lakukan lebih menggunakan teori ekonomi digital yang lebih membicarakan tentang sifat yang berkembang atas keterlibatan Tiongkok dengan negara Indonesia dalam aspek pertumbuhan ekonomi melalui digitalisasi. Sehingga terdapat perbedaan baik dari sisi teori serta dari negara yang dibahas, meskipun sama-sama membicarakan mengenai gerakan ekspansi Tiongkok dalam melakukan transformasi ekonomi (Kate and Stewart 2015).

Kedua, jurnal yang dilakukan oleh, Radita Gora Tayibnapi (2022) dalam *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol. 5 No.2* dengan judul “*China Digital Silk Road and Indonesia Digital Transformation*”. Pada jurnal tersebut dijelaskan bahwa bagaimana kebijakan terbaru Tiongkok yaitu *Belt and Road Initiative* melalui kebijakan *Digital Silk Road* menjadi jembatan baru mengintegrasikan sistem

pasar global dan perluasan pengaruh Tiongkok, serta bagaimana upaya dominasi Tiongkok dalam ekonomi digital global dengan melakukan investasi pada infrastruktur digital, e-commerce, teknologi canggih, dan norma internasional terhadap dunia teknologi. yang dilaksanakan melalui pendekatan aktor domestik seperti pemerintah, swasta, parlemen Indonesia sebagai respon *Belt and Road*. Meskipun dalam penelitian ini dijelaskan mengenai bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam mengintegrasikan ekonomi digital Tiongkok melalui kebijakan *Digital Silk Road*. secara keseluruhan dalam tulisan ini menyebutkan secara spesifik terhadap pengaplikasian *Digital Silk Road* dan alur investasinya yang menjadikan kontribusi Tiongkok berdasarkan aliran dana kepada Indonesia tanpa melihat progres dan dampak bagi Indonesia. Selain itu terdapat perbedaan teori yang digunakan yang dimana dalam jurnal ini lebih kepada teori pendekatan realisme neoklasik sedangkan teori yang saya gunakan dalam tulisan ini lebih kepada teori ekonomi digital (Tayibnapis 2022).

Ketiga, jurnal yang dilakukan oleh Muhammad Zulham (2021) dalam *Jurnal Maritim Indonesia Vol. 9, No. 3* dengan judul “*The Importance of Belt and Road Initiatives for Indonesia in Realizing the Global Maritime Fulcrum*”. Pada jurnal tersebut dijelaskan bahwa *Belt and Road Initiative Program* dianggap sebagai langkah awal bagi Indonesia untuk mencapai visi GMF. Kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok atas GMF dan *Belt and Road Initiative Program* dituangkan dalam *Memorandum of Understanding* pada tahun 2018. Penelitian yang dilakukan tidak memiliki faktor dan upaya yang spesifik dalam menilai aspek strategis dan teoritis yang mendasari pentingnya *Belt and Road Initiative Program* bagi Indonesia. Selain itu, penelitian yang diberikan juga tidak secara

detail membahas tantangan dan kendala yang mungkin dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan kerjasama BRI-GMF. Secara keseluruhan perbedaan penelitian terletak dalam tulisan ini yang menyebutkan fokus upaya menjalankan *Belt and Road Initiative Program* sama pentingnya bagi Indonesia dalam perwujudan GMF (Muhammad 2021).

Penelitian mengenai hubungan antara negara dan perusahaan multinasional, khususnya antara Indonesia dan Tiongkok, telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan. Jurnal oleh Kate Hannan dan Stewart Firth (2015) fokus pada keterlibatan Tiongkok dengan negara-negara kepulauan Indo-Pasifik dalam konteks perdagangan dan investasi, serta dampak ketergantungan negara-negara kecil terhadap investasi Tiongkok, tanpa membahas aspek digitalisasi. Sementara itu, jurnal oleh Radita Gora Tayibnapis (2022) menekankan *Digital Silk Road* sebagai jembatan untuk mengintegrasikan ekonomi digital Tiongkok dan Indonesia, tetapi kurang mendalami dampak konkret bagi Indonesia dan lebih berfokus pada aliran dana tanpa mempertimbangkan implikasi jangka panjang. Di sisi lain, penelitian oleh Muhammad Zulham (2021) menyoroti pentingnya *Belt and Road Initiative* (BRI) bagi Indonesia, namun tidak membahas tantangan dalam implementasi kerjasama tersebut secara rinci. *Novelty* dari penelitian ini terletak pada fokus pada teori ekonomi digital dan analisis mendalam mengenai dampak investasi pemerintah Tiongkok dalam infrastruktur digital di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana keterlibatan Tiongkok dan aktor terlibat lainnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui digitalisasi, memberikan dampak baru tentang strategi

pengembangan ekonomi digital Indonesia dalam konteks kerjasama dengan Tiongkok.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menggunakan Teori *Geoeconomic* sebagai kerangka pemikiran. Pendekatan yang diberikan bersifat teoritis dan empiris dalam mengidentifikasi dan mendapatkan hasil optimal. *Geoeconomic* didefinisikan sebagai instrumen ekonomi untuk mempromosikan dan mempertahankan kepentingan nasional tanpa mengabaikan hasil konsekuensi geopolitik yang menguntungkan. *Geoeconomic* berakar dari realisme yang menekankan persaingan kekuatan antarnegara dan ekonomi sebagai “senjata” non-militer yang efektif (Blackwill and Harris 2017, 19).

Robert D. Blackwill dan Jennifer M. Harris mengartikulasikan konsep *geoeconomic* dalam bukunya berjudul *War by Other Means : Geoeconomics and Satecraft*, terdapat 7 instrumen dalam konsep *geoeconomic* seperti, (1) kebijakan perdagangan (*Trade Policy*), (2) kebijakan investasi (*Investment Policy*), (3) kebijakan sanksi ekonomi (*Economic Sanctions*), (4) kebijakan siber (*Cyber Policy*), (5) bantuan dan hibah ekonomi (*Economic Aids*), (6) kebijakan finansial dan moneter (*Monetary and Currency Policy*), (7) kebijakan energi dan komoditas (*Energy and Commodity Policy*) (Blackwill and Harris 2017, 49-86).

Penggunaan instrumen-instrumen ini ditujukan untuk memaksa (*coerce*), membujuk (*inducement*), atau mendukung (*support*) negara lain guna mencapai kepentingan nasional, yang menunjukkan pergeseran dari penekanan tradisional pada aspek militer dalam hubungan internasional. Untuk memperjelas

instrumen-instrumen tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel yang merangkum alat-alat utama *geoconomics* sebagai berikut :

Tabel 1.1. Tujuh Instrumen *Geoconomics*

Kebijakan Perdagangan	Diantaranya perjanjian perdagangan, tarif, kuota, dan standar untuk melindungi industri domestik, menekan negara lain, atau sebagai alat
Kebijakan Investasi	Pengurusan investasi asing langsung (<i>FDI</i>), oleh BUMN (<i>State-Owned Enterprises/SOEs</i>) dan insentif investasi untuk mengontrol akses ke sektor-sektor strategis, menjaga keamanan nasional, dan menyeimbangkan pengaruh ekonomi asing
Kebijakan Sanksi Ekonomi dan Keuangan	Seperti pembekuan aset, larangan transaksi, atau pembatasan akses ke sistem keuangan internasional, sebagai bentuk hukum atau tekanan pada negara, entitas, atau individu tertentu
Kebijakan Siber	Termasuk terhadap pembangunan infrastruktur siber, penetapan standar siber, serangan siber, dan pengumpulan

	data baik untuk mempengaruhi atau mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan negara
Bantuan dan Hibah Ekonomi	Baik berupa pinjaman maupun program pembangunan sebagai insentif untuk membangun aliansi, mempengaruhi kebijakan negara penerima, atau menciptakan ketergantungan ekonomi
Kebijakan Finansial dan Moneter	Sebagai bentuk manipulasi nilai tukar, mengontrol arus modal, dan menggunakan cadangan devisa sebagai alat mempengaruhi perekonomian negara lain atau menstabilkan ekonomi domestik
Kebijakan Energi dan Komoditas	Merupakan kontrol atas pasokan energi serta komoditas penting lainnya yang dapat digunakan sebagai alat pengaruh, baik dengan insentif maupun ancaman kepada negara lain

Sumber : (Blackwill and Harris 2017)

Dalam Kerangka ini menekankan bahwa dalam lanskap internasional kontemporer telah menghasilkan sebuah pandangan persaingan global yang telah bergeser. Negara-negara semakin mengandalkan alat-alat ekonomi, seringkali sebagai alternatif atau pelengkap kekuatan militer, untuk mencapai tujuan-tujuan strategis mereka. Kekuatan ekonomi telah menjadi komponen krusial dari kekuatan nasional dan merupakan instrumen fundamental dalam pelaksanaan tata negara (*statecraft*) di abad ke-21 (Blackwill & Harris, 2016, 1-2). Hal ini mengarah pada suatu realitas di mana “dalam dunia saat ini, mustahil untuk memisahkan ekonomi dari geopolitik. Tata negara ekonomi adalah tata negara, titik.” (Blackwill & Harris, 2016, hlm. 236). Konsekuensinya, negara-negara yang gagal mengadaptasi dan mengintegrasikan perangkat *geoeconomics* ke dalam strategi besar mereka berisiko kehilangan pengaruh dan terpinggirkan dalam sistem internasional yang semakin kompetitif secara ekonomi (Blackwill & Harris, 2016, 235).

Dalam konteks Kebijakan *Digital Silk Road*, *geoeconomics* membantu menganalisis kepentingan dari kedua negara tersebut, terutama bagi Tiongkok. Kedua negara tentu memiliki agendanya masing-masing yang bisa saja berbenturan atau beririsan satu sama lain. Oleh sebab itu, proses kedua pihak ditinjau dengan instrumen-instrumen yang ada pada *geoeconomic theory*. Meskipun keterlibatan Tiongkok terhadap pertumbuhan ekonomi digital berpotensi memberikan keuntungan bagi Indonesia, sejatinya hal tersebut bagian dari penerapan strategis dari “Kebijakan Investasi” dan elemen “Kebijakan Siber”. *Digital Silk Road* bukan sekedar kepentingan komersial, tetapi kepentingan geopolitik yang lebih luas melalui cara-cara ekonomi. Semuanya sejalan dengan

upaya untuk "membujuk" atau "mendukung" (*induce/support*) negara lain demi mencapai tujuan strategis jangka panjangnya.

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan serangkaian rumusan masalah, tinjauan pustaka, dan kerangka pemikiran maka argumen sementara dari penelitian ini adalah bahwa pada tahun 2022 hingga tahun 2024, menunjukkan dinamika saling menguntungkan sekaligus berisiko. Bagi Tiongkok, 2022 menandai penetrasi pasar infrastruktur digital yang memperluas pengaruh fundamental teknologinya. Indonesia diuntungkan melalui akselerasi infrastruktur. Tahun 2023, kolaborasi *e-commerce* dan *fintech* semakin dalam. Tiongkok mendapatkan akses pasar masif, sementara Indonesia memperoleh peningkatan volume ekonomi digital, diiringi tantangan persaingan bagi pemain lokal dan keamanan siber dengan kekhawatiran atas kedaulatan data dan ketergantungan teknologi. Memasuki 2024, fokus pada transfer teknologi dan pengembangan AI menawarkan peningkatan kapasitas bagi Indonesia, selaras dengan ambisi Tiongkok menyebarkan standarnya. Tiongkok berupaya menjaga momentum investasi di tengah dinamika geopolitik dan proteksionisme global.

Tindakan Tiongkok lebih merupakan upaya "membujuk" (*induce*) daripada sekadar "mendukung" (*support*). Pembujukan ini dieksekusi secara sistematis melalui berbagai instrumen geoekonomi. Instrumen utama yang digunakan adalah kebijakan investasi strategis untuk menguasai infrastruktur kritis (pusat data Alibaba Cloud) dan mengakuisisi platform dominan (manuver ByteDance terhadap Tokopedia), yang secara efektif mengatasi hambatan regulasi

dan mengamankan dominasi pasar. Adapun instrumen kebijakan perdagangan dan standar yang mendorong adopsi teknologi Huawei, menciptakan ketergantungan teknis jangka panjang (*path dependency*). Kebijakan keuangan melalui bank kebijakan Tiongkok menawarkan skema pembiayaan yang mengikat Indonesia pada ekosistem teknologi Tiongkok, sementara instrumen bantuan dan pembangunan kapasitas seperti *Huawei ASEAN Academy* digunakan untuk membangun *soft power* dan loyalitas teknis di kalangan talenta digital masa depan.

Perlu digaris bawahi bahwa instrumen sanksi tidak digunakan secara eksplisit akan tetapi ketiadaannya menjadi alat pengaruh, di mana Tiongkok menjaga keran perdagangan komoditas vital tetap terbuka untuk memastikan Indonesia tidak mengambil sikap konfrontatif. Demikian pula, instrumen energi dan komoditas khususnya dikarenakan fokusnya pada sektor nikel, hal ini tidak digunakan secara langsung dalam *DSR*, tetapi berfungsi sebagai fondasi yang memperlambat hubungan dan menciptakan modal politik, yang memuluskan jalan bagi agenda Tiongkok di sektor digital yang lebih sensitif. Dengan demikian, Tiongkok secara strategis mengikat Indonesia ke dalam ekosistem teknologi dan keuangannya, yang bagi Indonesia adalah katalisator pertumbuhan, namun bagi Tiongkok adalah cara mengamankan pengaruh dan pasar jangka panjang.

1.8 Metode Penelitian

1.1.1 Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dimana penelitian ini membahas dengan secara deskripsi mengenai topik penelitian, yang didasari bahwa topik ini membutuhkan gambaran mengenai permasalahan yang ada.

1.1.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian berfokus pada Pemerintah Tiongkok terhadap pertumbuhan ekonomi digital Indonesia pada tahun 2022 hingga 2024 dengan melibatkan berbagai dimensi pendukung. Selain itu, objek penelitian berfokus pada kebijakan *Digital Silk Road* Tiongkok di Indonesia, dengan rentang penelitian pada tahun 2022 hingga 2024.

1.1.3 Metode Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder yang meliputi berbagai sumber seperti publikasi akademis, laporan berita, analisis kebijakan, dokumen resmi, artikel, jurnal, buku, laporan, maupun prosiding dan literatur yang relevan. Penelitian ini turut menyertakan hasil teori yang akan dipelajari, dikutip, dan dianalisis berkaitan dengan tema yang diteliti.

1.9 Sistematika Pembahasan

Terdapat 4 bab utama yang penulis kategorikan

1. Bab 1 : Pendahuluan

Bab ini membahas dengan rincian yaitu latar belakang menjelaskan secara mendasar mengenai permasalahan yang akan diangkat, rumusan masalah sebagai acuan pertanyaan penelitian, kerangka pemikiran sebagai dasar pembahasan penelitian, argumen sementara sebagai perkiraan pembahasan penelitian, metode penelitian sebagai cara penulis melakukan penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengategorikan pembahasan.

2. Bab 2 : Menjelaskan bagaimana strategi upaya program kebijakan *Digital Silk Road* Tiongkok memberikan dampak pertumbuhan bagi perekonomian Indonesia melalui sektor ekonomi digital pada tahun 2022 hingga 2024

3. Bab 3 : Analisis

Bab ini membahas analisis dengan data-data yang telah dibahas pada Bab sebelumnya dengan menggunakan instrumen-instrumen *Geoeconomics* oleh Robert D. Blackwill dan Jeniffer M. Harris dalam buku *War by Other Means : Geoeconomics and Statecraft* guna menjawab rumusan masalah.

4. Bab 4 : Kesimpulan

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan menyeluruh dari temuan penelitian dan rekomendasi terkait penelitian ini.

BAB 2

KONTEKSTUAL UPAYA GEOEKONOMI TIONGKOK MELALUI DIGITAL SILK ROAD DI INDONESIA

Ekonomi digital Tiongkok telah mengalami pertumbuhan eksponensial dalam dekade terakhir, didorong oleh investasi besar-besaran dalam infrastruktur teknologi, inovasi kecerdasan buatan (AI), dan integrasi kebijakan negara dengan agenda industri. Pada 2024, nilai tambah ekonomi digital Beijing mencapai 2 triliun yuan (sekitar 278 miliar dolar AS), dengan pertumbuhan tahunan sebesar 7,5%⁵. Pencapaian ini tidak lepas dari strategi sistematis yang melibatkan lebih dari 2.400 perusahaan AI dan pengembangan infrastruktur komputasi canggih, termasuk jaringan terintegrasi nasional dan zona demonstrasi kendaraan otonom seluas 600 km² (Xinhua Institute 2025). Pemerintah Tiongkok juga menargetkan kapasitas komputasi melebihi 300 PFLOPS pada 2025, menunjukkan komitmen untuk menjadi pemimpin global dalam ekonomi berbasis data (Alviansyah 2023). Pemerintah Tiongkok secara eksplisit mengartikulasikan ambisi ini dalam dokumen-dokumen strategis seperti Rencana Lima Tahun ke-14 (2021-2025) dan visi "*Made in China 2025*". Dokumen-dokumen ini tidak hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kemandirian teknologi (*technological self-reliance*) dan penetapan standar global, yang menjadi landasan ideologis bagi ekspansi *Digital Silk Road* Ke luar negeri.

Transformasi ini selaras dengan visi "*Made in China 2025*" yang bertujuan memodernisasi sektor manufaktur melalui digitalisasi. Pada 2024, Tiongkok mencatat nilai impor-ekspor layanan digital sebesar 1,42 triliun yuan dan transaksi

e-commerce lintas batas mencapai 1,22 triliun yuan, mencerminkan dominasi dalam perdagangan digital global (Xinhua Institute 2024). Kebijakan *Digital Silk Road* tidak lahir dalam ruang hampa. Ia merupakan evolusi logis dan proyeksi eksternal dari strategi pembangunan digital domestik Tiongkok yang sangat ambisius. Strategi ini didasarkan pada filosofi "sirkulasi ganda" (*dual circulation*), dimana pasar domestik yang kuat menjadi fondasi untuk ekspansi internasional yang agresif. Kebijakan ini dirancang untuk mengubah keberhasilan domestik menjadi pengaruh geoekonomi global. Untuk memahaminya secara utuh, penting untuk menelusuri arsitektur ekonomi digital Tiongkok dan bagaimana *Digital Silk Road Berfungsi* sebagai perpanjangan tangan strategisnya. *Digital Silk Road* (DSR) merupakan pilar teknologi dari *Belt and Road Initiative* (BRI) yang diluncurkan pada 2015. Inisiatif ini bertujuan menciptakan tatanan digital yang berpusat pada kepentingan Tiongkok, mengurangi ketergantungan pada teknologi AS, dan memperluas pengaruh geopolitik melalui infrastruktur kritis seperti jaringan 5G, kabel data bawah laut, dan sistem satelit BeiDou. Hingga 2018, investasi *Digital Silk Road* di luar Tiongkok telah mencapai 79 miliar dolar AS, dengan fokus pada interoperabilitas infrastruktur digital dan integrasi pasar (Rajeshwari and Richard 2021).

2.1. Ekonomi Digital Tiongkok: Skala, Pertumbuhan, dan Dominasi

Ekonomi digital telah menjadi mesin penggerak utama pertumbuhan ekonomi Tiongkok dalam dekade terakhir. Pada tahun 2022, skala ekonomi digital Tiongkok mencapai 50,2 triliun yuan (sekitar US\$7,1 triliun), menyumbang 41,5% dari total PDB negara (Cyberspace Administration of China 2023). Angka

ini menunjukkan peran sentral sektor digital dalam struktur ekonomi nasional Tiongkok. Pertumbuhan ini didorong oleh beberapa faktor kunci: penetrasi *internet* yang masif dengan lebih dari 1,079 miliar pengguna *internet* pada tahun 2023, angka tersebut mendapatkan kenaikan signifikan pada laporan terakhir pada bulan Juni 2024 dengan lonjakan sebesar 1,1 Triliun pengguna sebuah peningkatan 7,42% dari laporan terakhir. Adopsi teknologi pembayaran digital yang hampir universal (seperti Alipay dan WeChat Pay), serta ekosistem *e-commerce* terbesar di dunia yang dimotori oleh raksasa seperti Alibaba dan JD.com (China Internet Network Information Center 2024).

Faktor pendorong utama lainnya adalah dukungan negara yang masif dan terkoordinasi. Pemerintah Tiongkok tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai investor, fasilitator, dan pelanggan utama bagi industri teknologinya. Melalui instrumen seperti "Guidance Funds" yang didukung negara, miliaran dolar disalurkan ke startup di sektor-sektor strategis seperti semikonduktor, AI, dan bioteknologi. Selain itu, kebijakan seperti "*Internet Plus*", yang diluncurkan pada tahun 2015, secara aktif mendorong integrasi teknologi *internet* dengan industri tradisional, menciptakan efisiensi dan model bisnis baru yang kemudian diekspor melalui DSR

Gambar 2.1 Keuangan di Balik Digital Silk Road

Chinese state financing for overseas digital infrastructure projects
(announced or committed between 2019 and 2023, selection)

SOURCE	RECIPIENT	AMOUNT (USD MILLION)	DATE	DESCRIPTION
Exim Bank	Ministry of Finance and Economic Development, Sierra Leone	30	2019	Huawei contract for Phase II of National Fibre Optic Backbone Project, laying 690 km of cables
China International Development Cooperation Agency (CIDCA)	Kragujevac State Data Center, Serbia	13	2019	Huawei's AI platform for Serbian e-government services
China Development Bank (CDB)	Turkcell, Turkey	559.9	2019	8-year loan for hardware and equipment procurement from Chinese vendors
Exim Bank	Government of Ghana	177	2020	Huawei equipment for Ghana Rural Telephony and Digital Inclusion Project
Bank of China	Government of Côte d'Ivoire	125.6	2020	Modernization of national police and defense networks and emergency command center
Ministry of Commerce (MOFCOM)	Government of Senegal	Unknown	2021	Contract with StarTimes for Phase II of satellite television program, covering more than 300 villages
Exim Bank	Ministry of Security of Burkina Faso	86.9	2021	Installation of 800 km of fiber optic cables and 900 surveillance cameras by Huawei and China Communications Construction Company (CCCC)
Exim Bank	Government of Benin	40	2021	Phase II of National Broadband Network Project, implemented by Huawei
Unspecified	Egyptian Space Agency	92	2022	Assembly and testing of MirSat 2 remote sensing satellite by China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
Sinosure and Citibank	Xtrim TVCable, Ecuador	32	2023	Acquisition of fiber optic equipment manufactured by ZTE
Exim Bank	Government of Uganda	150	2023	Development of national internet infrastructure

Sumber: MERICS based on media report, AidData Global Chinese Development

Finance

Pemerintah Tiongkok memainkan peran krusial melalui kebijakan industri yang terarah, seperti "*Made in China 2025*" dan Rencana Lima Tahun ke-14 (2021-2025) yang menempatkan "inovasi yang digerakkan oleh teknologi" sebagai pilar utama. Fokusnya adalah pada pengembangan teknologi inti generasi mendatang, termasuk *Artificial Intelligence (AI)*, *5G*, *Quantum Computing*, dan *Internet of Things (IoT)*. Kebijakan ini secara eksplisit bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Tiongkok pada teknologi asing, terutama dari Barat, dan membangun rantai pasok teknologi yang berpusat di Tiongkok. Ambisi ini menciptakan dorongan kuat bagi perusahaan Tiongkok untuk tidak hanya mendominasi pasar domestik tetapi juga mengamankan pasar luar negeri untuk

memastikan skala ekonomi dan pengaruh global. Investasi besar-besaran dialokasikan untuk riset, sementara perusahaan-perusahaan teknologi didorong untuk berekspansi ke pasar global. Perusahaan seperti Huawei, misalnya, telah menjadi pemimpin global dalam infrastruktur telekomunikasi 5G, sementara DJI mendominasi pasar drone global. Keberhasilan domestik ini memberikan Tiongkok keunggulan komparatif, modal, dan teknologi yang siap untuk diekspor ke negara lain melalui kerangka DSR.

2.2. Strategi Digital Silk Road (DSR) di Indonesia

Digital Silk Road (DSR), atau *Digital Silk Road of the 21st Century*, secara resmi diperkenalkan pada tahun 2015 sebagai komponen digital dari inisiatif global andalan Tiongkok, *Belt and Road Initiative (BRI)*. *Digital Silk Road* bukanlah sekadar proyek pembangunan kabel serat optik bawah laut, melainkan sebuah kerangka kerja komprehensif yang bertujuan untuk memperluas pengaruh digital Tiongkok secara global. Tujuannya multi-dimensi, mencakup aspek ekonomi, teknologi, dan geopolitik. Secara resmi, pemerintah Tiongkok menggambarkannya sebagai inisiatif untuk "membangun komunitas dengan masa depan bersama di dunia maya" (*a community with a shared future in cyberspace*), sebuah narasi yang menekankan kerja sama dan saling menguntungkan. Namun, dibalik narasi tersebut, *Digital Silk Road* adalah instrumen kebijakan luar negeri yang dirancang untuk membentuk kembali tatanan digital global sesuai dengan kepentingan dan visi Tiongkok.

Grafik 2.1. Nilai Ekonomi Digital Indonesia per Tahun (2022-2024)



Sumber : *Google-Temasek-Bain (2023)*

Secara ekonomi, *Digital Silk Road* bertujuan untuk menciptakan pasar baru bagi raksasa teknologi Tiongkok (Joshua, 2020). Setelah pasar domestik mulai jenuh, perusahaan seperti Alibaba, Tencent, dan Huawei membutuhkan arena pertumbuhan baru. Negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, dengan populasi muda dan ekonomi digital yang sedang tumbuh, menjadi target utama. Dengan menyediakan infrastruktur digital, platform *e-commerce*, dan sistem pembayaran, Tiongkok secara efektif membangun ekosistem digital yang terintegrasi dengan standarnya.

Tabel 2.1. Investasi Infrastruktur Digital Pemerintah Tiongkok (2022-2024)

Tahun	Investasi (Miliar USD)	Proyek Utama	Mitra Lokal
2022	12,5	Pusat Data	Telkom Indonesia
2023	15,8	Jaringan 5G & Backbone	XL Axiata
2024	18,2	E-Commerce Platform	Shopee, Bukalapak

Sumber : (Lebang, Gatra, and Trissia 2023)

Secara teknologi, *Digital Silk Road* adalah kendaraan bagi Tiongkok untuk mengeksport standar teknisnya (Vivek and Ruby, 2025). Dalam bidang seperti 5G, AI, dan kota pintar (*smart city*), Tiongkok berupaya menjadikan teknologinya sebagai standar de facto global. Dengan menetapkan standar, Tiongkok dapat memastikan interoperabilitas jangka panjang yang menguntungkan perusahaannya, menciptakan efek penguncian (*lock-in effect*) bagi negara-negara yang mengadopsinya, dan mengurangi dominasi badan-badan standardisasi yang dipimpin oleh Barat seperti IEEE dan 3GPP. Dengan membangun infrastruktur di negara lain menggunakan teknologi Huawei atau ZTE, Tiongkok memastikan interoperabilitas dan ketergantungan jangka panjang terhadap teknologinya (Hillman 2021). Hal ini merupakan tantangan langsung terhadap dominasi teknologi Barat yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Tabel 2.2. Pilar Strategi *Digital Silk Road* Tiongkok di Indonesia (2022-2024)

Pilar Strategi DSR	Aktor Utama Tiongkok	Bentuk Implementasi di Indonesia	Tujuan Strategis
Infrastruktur Cloud & Data	Alibaba Cloud, Tencent Cloud, Huawei Cloud	Pembangunan 3 pusat data Alibaba Cloud; ekspansi pusat data Tencent; penawaran layanan AI dan Big Data.	Mendominasi pasar cloud; mengontrol infrastruktur data; menjadikan Indonesia hub regional.
Konektivitas & 5G	Huawei, ZTE	Kemitraan uji coba 5G dengan operator lokal; penyediaan peralatan jaringan 4G/5G; program pelatihan " <i>Huawei ASEAN Academy</i> ".	Membangun fondasi untuk adopsi standar teknologi 5G Tiongkok; mengunci pasar infrastruktur telekomunikasi.

Platform & Ekosistem Digital	ByteDance (TikTok), Tencent (investasi), Ant Group	Ekspansi TikTok Shop (sebelum regulasi); investasi strategis di GoTo, Bukalapak, Traveloka; promosi solusi pembayaran digital.	Mendapatkan akses pasar konsumen; mengintegrasikan platform Tiongkok ke dalam ekonomi digital Indonesia.
Pengembangan SDM & Standar	Huawei, Alibaba	Program " <i>Huawei ICT Competition</i> ", " <i>Alibaba Netpreneur Training</i> "; penawaran sertifikasi teknologi.	Menciptakan ketergantungan pada keahlian dan teknologi Tiongkok; menanamkan pengaruh (<i>soft power</i>).

sumber : (Arinanda, Windiani, and Paramasatya 2022, 77)

Pada periode 2022-2024, fokus investasi ini semakin tajam, tidak hanya pada infrastruktur fisik tetapi juga pada penguasaan platform digital dan pembentukan ekosistem lokal yang bergantung pada teknologi Tiongkok, yang mencerminkan pematangan strategi geoekonomi Beijing

Strategi *Digital Silk Road* diimplementasikan melalui dua pendekatan: makro (pembangunan infrastruktur fisik) dan mikro (penguatan ekosistem digital

lokal). Pada tingkat makro, Tiongkok membangun pusat data di Thailand, jaringan 5G di Malaysia, dan mengadopsi BeiDou di Pakistan serta Laos (Lin 2024). Sementara di tingkat mikro, perusahaan seperti Huawei dan ZTE menyediakan perangkat keras terjangkau, sementara platform *e-commerce* seperti Alibaba memperluas jangkauan pasar digital. Kebijakan ini diperkuat oleh kerjasama bilateral, seperti perpustakaan hukum digital dengan Kamboja dan pelatihan sumber daya manusia di bidang teknologi (Xinhua Institute 2024). Pendekatan ganda ini memungkinkan Tiongkok untuk membangun fondasi struktural (infrastruktur) sambil secara bersamaan menumbuhkan ketergantungan fungsional (ekosistem) di negara-negara mitra.

Tabel 2.3. Pilar Strategi Geoekonomi Tiongkok dalam DSR

Pilar Strategi	Deskripsi	Contoh Implementasi di Indonesia
Investasi & Akuisisi Teknologi	Menggunakan kekuatan modal untuk berinvestasi atau mengakuisisi perusahaan teknologi di negara target, guna mendapatkan akses pasar dan talenta lokal.	Investasi Alibaba di Tokopedia dan DANA; Investasi Tencent di Gojek (sebelum merger menjadi GoTo).

<p>Pembangunan Infrastruktur Kritis</p>	<p>Membiayai dan membangun infrastruktur digital fundamental (kabel optik, 5G, data center) untuk menciptakan ketergantungan struktural.</p>	<p>Keterlibatan Huawei dan ZTE dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi 4G/5G; Pembangunan data center oleh Alibaba Cloud.</p>
<p>Penetapan Standar Teknis</p>	<p>Mendorong adopsi standar teknologi Tiongkok (misalnya dalam 5G, IoT, AI) untuk memastikan keunggulan kompetitif jangka panjang.</p>	<p>Promosi solusi dan perangkat 5G Huawei kepada operator telekomunikasi Indonesia.</p>
<p>Ekspor Model Bisnis Digital</p>	<p>Mereplikasi keberhasilan model bisnis domestik (e-commerce, fintech, super-app) di pasar luar negeri melalui platform dan aplikasi.</p>	<p>Kehadiran TikTok Shop yang mengintegrasikan media sosial dengan e-commerce, menantang pemain yang sudah ada.</p>
<p>Diplomasi Digital & Pelatihan</p>	<p>Menawarkan program pelatihan, beasiswa, dan lokakarya untuk talenta digital di negara mitra, guna</p>	<p>Program pelatihan "<i>Huawei ICT Academy</i>" dan beasiswa bagi mahasiswa Indonesia</p>

	membangun <i>soft power</i> dan familiaritas dengan ekosistem teknologi Tiongkok.	untuk belajar teknologi di Tiongkok.
--	---	--------------------------------------

Digital Silk Road merupakan perwujudan dari strategi geoekonomi Tiongkok yang canggih. Ia menggunakan instrumen ekonomi dan teknologi untuk mencapai tujuan strategis jangka panjang. Strategi ini dapat diuraikan ke dalam beberapa pilar utama, seperti yang dirangkum dalam tabel di bawah ini.

Strategi ini dirancang untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan namun asimetris. Di satu sisi, negara mitra seperti Indonesia mendapatkan akses ke teknologi canggih, investasi, dan infrastruktur yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat transformasi digitalnya (Goodman, 2019). Di sisi lain, Tiongkok mendapatkan pasar yang luas, pengaruh geopolitik, serta kemampuan untuk membentuk aturan main dalam ekonomi digital global di masa depan.

BAB 3
ANALISIS GEOEKONOMI KEBIJAKAN DIGITAL SILK ROAD
TIONGKOK DI INDONESIA

Setelah membahas mengenai upaya dan perspektif Tiongkok dalam menjalankan strategi *Digital Silk Road* di Indonesia, bab ini akan melanjutkannya dengan analisis geoekonomi terkait kebijakan yang berjalan tersebut. Pertama dan terpenting, *Digital Silk Road* (DSR) itu sendiri adalah sebuah inisiatif kebijakan negara, bukan gagasan yang lahir dari ruang rapat dewan direksi perusahaan. *Digital Silk Road* secara resmi diluncurkan oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 2015 sebagai komponen digital dari kebijakan andalannya, *Belt and Road Initiative* (BRI). "*The Digital Silk Road is a state-led effort to embed Chinese influence in other countries' digital infrastructure and set the rules for the global digital economy.*" (Chilukuri and Scanlon 2025). Dalam kerangka DSR, perusahaan seperti Huawei, Alibaba, dan ZTE berfungsi sebagai "juara nasional" (国家队, *guójiā duì*). Mereka adalah instrumen utama bagi pemerintah Tiongkok untuk mencapai tujuan strategisnya. Hubungan ini bersifat dua arah, pemerintah memberikan dukungan masif (finansial, diplomatik, dan politik), dan perusahaan melaksanakan agenda negara di luar negeri.

Pemerintah Tiongkok, melalui kebijakan *Digital Silk Road*, secara sistematis menerapkan berbagai instrumen geoekonomi untuk mengintegrasikan Indonesia ke dalam ekosistem digitalnya "penggunaan instrumen ekonomi untuk mempromosikan dan mempertahankan kepentingan nasional, serta untuk menghasilkan konsekuensi geopolitik yang menguntungkan (Blackwill and

Harris, 2016)." Analisis terhadap implementasi kebijakan *Digital Silk Road* Tiongkok di Indonesia melalui kaca mata geoekonomi Blackwill dan Harris menunjukkan bahwa tindakan Tiongkok jauh melampaui sekadar "dukungan" filantropis atau komersial murni. Setiap instrumen yang digunakan investasi, keuangan, standar, dan pembangunan kapasitas dikalibrasi secara strategis untuk "membujuk" dan "mengarahkan" Indonesia menuju lintasan pembangunan digital yang selaras dengan kepentingan nasional Tiongkok. Ini adalah manifestasi dari "*economic statecraft*" di abad ke-21, di mana kekuatan ekonomi tidak lagi hanya menjadi pelengkap, tetapi seringkali menjadi ujung tombak kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri tidak lagi hanya domain para diplomat dan jenderal, tetapi juga para menteri keuangan, bankir sentral, dan CEO perusahaan-perusahaan strategis. hakikatnya adalah proyeksi kekuatan ekonomi dan teknologi Tiongkok untuk mencapai tujuan-tujuan strategis jangka panjang.

3.1. Instrumen 1: Kebijakan Perdagangan di Era Digital

Dalam konteks geoekonomi, kebijakan perdagangan melampaui sekedar transaksi jual-beli barang dan jasa digital. Negara menggunakan berbagai variabel dalam kebijakan ini, seperti penerapan tarif, kuota impor, dan hambatan non-tarif (misalnya, peraturan sanitasi, standar teknis, dan prosedur bea cukai yang diperlambat) untuk tujuan strategis. Instrumen ini dapat digunakan secara positif sebagai insentif, misalnya dengan memberikan akses pasar preferensial kepada negara sahabat untuk memperkuat aliansi atau mendorong reformasi kebijakan. Sebaliknya, kebijakan perdagangan juga dapat digunakan sebagai alat paksaan (koersi). Contohnya, sebuah negara dapat secara tiba-tiba memberlakukan

larangan impor terhadap produk vital dari negara lain untuk menunjukkan ketidaksetujuan atas kebijakan luar negeri atau keamanan negara tersebut, seperti yang sering dilakukan Rusia terhadap negara-negara tetangganya atau Tiongkok dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan (Blackwill & Harris, 2016, hlm. 50-53).

Dalam konteks *Digital Silk Road*, kebijakan perdagangan Tiongkok tidak hanya berfokus pada volume ekspor-impor, tetapi secara strategis digunakan untuk menciptakan pasar bagi produk teknologi tinggi dan, yang lebih penting, untuk menetapkan standar teknis yang menguntungkannya. Pemerintah Tiongkok secara aktif memberikan subsidi ekspor, keringanan pajak, dan dukungan diplomatik kepada "juara nasional nya" Huawei, memungkinkan mereka untuk menawarkan harga yang sangat kompetitif yang sulit ditandingi oleh pesaing dari Eropa (seperti Ericsson dan Nokia) atau Amerika. Ini adalah bentuk persuasi yang canggih, di mana "produk" yang diekspor adalah sebuah ekosistem dan arsitektur sistem. Huawei telah sangat proaktif dalam membangun ekosistem. Pada September 2023, Indosat Ooredoo Hutchison menandatangani MoU dengan Huawei untuk "mempercepat transformasi digital Indonesia," yang mencakup inovasi bersama dalam 5G (Josa, 2024). Keterlibatan mendalam Huawei dalam tahap uji coba dan pengembangan dengan hampir semua operator besar di Indonesia secara efektif menempatkannya pada posisi terdepan. Ketika Indonesia mengadopsi teknologi 5G dari Huawei, Indonesia tidak hanya membeli perangkat keras, tetapi Indonesia secara implisit mengadopsi arsitektur jaringan dan standar teknis yang dikembangkan di Tiongkok.

Kemitraan ini jauh melampaui sekadar transaksi jual-beli perangkat. Ini adalah sebuah "*inducement*" strategis bagi pemerintah Indonesia untuk

mengadopsi seluruh platform teknologi Huawei mulai dari sensor, jaringan 5G, *cloud*, hingga platform analitik data. Dengan mengunci sebuah proyek strategis nasional yang sangat simbolis seperti Ibu Kota Nusantara pada satu ekosistem, Tiongkok secara efektif menciptakan ketergantungan teknis jangka panjang (*path dependency*). Hal ini secara signifikan menghambat masuknya vendor dari negara pesaing (misalnya dari Eropa atau Amerika Serikat) di masa depan, karena biaya untuk beralih (*switching cost*) akan menjadi sangat tinggi. Tiongkok juga tidak hanya "mendukung" pembangunan IKN, tetapi "membujuk" Indonesia untuk membangun fondasi digital ibukota barunya di atas arsitektur teknologi Tiongkok. Selain itu, Tiongkok secara agresif mempromosikan solusi paket. Contohnya adalah penandatanganan MoU antara Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Huawei pada Mei 2023 untuk menjadikan Ibu Kota Negara sebagai *smart city*. Kemitraan ini tidak hanya tentang penyediaan konektivitas, tetapi juga tentang pengadopsian seluruh platform *smart city* Huawei, yang mencakup sensor, *cloud*, dan analitik data (Sayekti 2022). Dengan menawarkan solusi terintegrasi "end-to-end", Tiongkok menyederhanakan proses pengadaan bagi Indonesia, namun pada saat yang sama, memaksimalkan penetrasi teknologinya di berbagai lapisan infrastruktur digital.

Dengan terlibat secara mendalam pada fase uji coba, Huawei tidak hanya menjual perangkat keras, tetapi juga secara implisit mendorong adopsi arsitektur jaringan dan standar teknis yang dikembangkannya. Upaya sinkronisasi standar ini menjadi lebih relevan ketika Tiongkok secara aktif mencoba mempengaruhi standar global yang kemudian diadopsi oleh Indonesia. Tiongkok menggunakan pengaruhnya di badan-badan standardisasi internasional seperti International

Telecommunication Union (ITU) untuk mempromosikan proposal teknisnya. Ketika standar ini diadopsi secara global, negara seperti Indonesia, karena pertimbangan biaya dan ketersediaan teknologi dari vendor seperti Huawei, cenderung menyelaraskan Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan standar de facto tersebut. Salah satu upaya Tiongkok dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik (*EV*), Tiongkok mendorong standarnya untuk stasiun pengisian daya. Meskipun belum ada adopsi langsung, dominasi perusahaan Tiongkok dalam rantai pasok baterai dan EV memberikan tekanan kuat bagi Indonesia untuk mengadopsi standar yang kompatibel demi menjaga interoperabilitas dan efisiensi. Hal ini menciptakan ketergantungan teknis jangka panjang yang sulit diubah karena biaya peralihan (*switching cost*) yang tinggi.

3.2. Instrumen 2: Kebijakan Investasi

Kebijakan investasi digunakan sebagai alat untuk mendapatkan kontrol atas aset-aset strategis, mengakses pasar dan data, serta menavigasi atau bahkan mengubah lanskap regulasi di negara target. Instrumen ini melibatkan penggunaan arus modal baik Investasi Asing Langsung (FDI) maupun investasi portofolio sebagai alat untuk mencapai tujuan geopolitik. Indikator utamanya adalah investasi yang diarahkan oleh negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau *Sovereign Wealth Funds* (SWF). Dengan mengarahkan investasi ke sektor-sektor strategis di negara lain (seperti infrastruktur, energi, atau telekomunikasi), sebuah negara dapat membangun ketergantungan ekonomi jangka panjang. Ketergantungan ini kemudian dapat diterjemahkan menjadi pengaruh politik, memastikan negara penerima investasi akan lebih segan untuk

mengambil kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan negara investor. Tiongkok secara ekstensif menggunakan instrumen ini di Afrika dan Amerika Latin untuk mengamankan pasokan sumber daya alam sekaligus membangun dukungan diplomatik (Blackwill & Harris, 2016, hlm. 53-58).

Pemerintah Tiongkok mengarahkan investasi tidak hanya untuk mencari keuntungan finansial, tetapi secara strategis untuk mengakuisisi aset digital penting, mendapatkan akses terhadap data pasar yang masif, dan mengatasi hambatan regulasi untuk memperdalam pengaruhnya. Investasi ini seringkali dilakukan oleh perusahaan yang, meskipun beroperasi sebagai entitas komersial, memiliki hubungan yang erat dengan negara dan tujuan strategis Partai Komunis Tiongkok, yang dikenal sebagai "*national champions*". Pemerintah Tiongkok, melalui entitas seperti *Alibaba Cloud* dan *Tencent Cloud* pada Juni 2021, telah secara masif berinvestasi dalam pembangunan pusat data (*data center*) di Indonesia sebagai upaya mendukung strategi "Indonesia Digital" (stillmen, 2021). Keputusan untuk membangun tiga *data center* oleh *Alibaba Cloud* di Indonesia bukan murni keputusan bisnis yang terisolasi. Instrumen yang paling terlihat dan berdampak adalah kebijakan investasi. Tiongkok telah menggunakan kekuatan modal dari perusahaan teknologi yang didukung negara (*state-backed tech giants*) untuk menembus dan membentuk pasar digital Indonesia. Investasi langsung (FDI) dari Tiongkok tidak hanya berupa uang, tetapi sebuah "paket" yang mencakup modal, teknologi, model bisnis, dan talenta. Ini adalah implementasi langsung dari arahan *Digital Silk Road* untuk membangun "tulang punggung" digital di negara-negara mitra.

Dengan menyediakan infrastruktur *cloud* lokal, Tiongkok menawarkan solusi terhadap regulasi lokalisasi data Indonesia (PP 71/2019), sebuah langkah "*inducement*" yang cerdas. Namun, ini juga berarti bahwa sebagian besar data dari perusahaan Indonesia yang menggunakan layanan mereka akan berada di dalam infrastruktur yang dibangun dan dikelola oleh entitas Tiongkok. Meskipun secara hukum data tersebut berada di wilayah Indonesia, kontrol operasional atas infrastruktur fisik dan perangkat lunak tetap berada di tangan perusahaan Tiongkok, menciptakan potensi risiko kedaulatan data jangka panjang. Pembiayaan untuk proyek-proyek semacam ini sering kali didukung oleh bank kebijakan Tiongkok, yang menawarkan skema pembiayaan jangka panjang yang sulit ditandingi oleh pesaing dari Barat.

Pemerintah Tiongkok secara aktif mendukung perusahaan-perusahaan ini melalui subsidi ekspor dan pinjaman dari bank-bank kebijakan milik negara seperti China Development Bank dan Export-Import Bank of China. Dukungan ini memungkinkan mereka menawarkan teknologi dengan harga yang jauh lebih kompetitif dibandingkan pesaing Eropa.

“China’s government essentially views the DSR as the outward-facing support to domestic efforts to digitalize the “real economy”. It continues to create favorable conditions for Chinese technology companies, both state-owned and private, to facilitate their internationalization. While the former receive direct state support, the latter are encouraged to pursue commercial opportunities abroad where it fits Beijing’s strategic goal of emerging technology leadership” (Gunter and Arcesti 2024)

Investasi strategis oleh manuver ByteDance (induk perusahaan TikTok) merupakan gerakan paling strategis yang dilakukan oleh Tiongkok. Setelah layanan *e-commerce*-nya (TikTok Shop) dilarang beroperasi oleh pemerintah Indonesia pada akhir 2023 karena melanggar Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/2023 yang memisahkan fungsi media sosial dan niaga-el, ByteDance tidak menarik diri dari pasar. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki hubungan erat dengan kebijakan negara Tiongkok ini melakukan langkah geoekonomi yang brilian. Pada Desember 2023, perusahaan mengumumkan investasi senilai 1,5 miliar USD untuk mengambil alih 75% saham Tokopedia, unit *e-commerce* dari GoTo, perusahaan teknologi terbesar di Indonesia (Ananda, 2023).

Ini menunjukkan penggunaan kekuatan modal yang luar biasa bukan hanya untuk masuk kembali ke pasar, tetapi untuk secara efektif menguasai salah satu platform *e-commerce* terpenting di Indonesia. Ini adalah contoh campuran dari persuasi geoekonomi, di mana kekuatan finansial digunakan untuk mengatasi hambatan regulasi dan memperdalam pengaruh secara signifikan. Tindakan ini adalah contoh sempurna dari persuasi, bukan dukungan. ByteDance tidak "mendukung" ekosistem *e-commerce* lokal dengan bersaing secara adil, melainkan menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk: (1) Mengatasi hambatan regulasi dengan "membeli" entitas lokal yang sudah patuh; (2) Mengakuisisi aset strategis, yaitu salah satu dari dua platform *e-commerce* terbesar di Indonesia; dan (3) Mengamankan dominasi pasar secara instan. Langkah ini secara efektif mengubah pesaing menjadi mitra junior dan memberikan ByteDance akses langsung ke puluhan juta konsumen dan data transaksi Tokopedia, sebuah aset strategis yang tak ternilai. Ini menunjukkan

bagaimana modal yang diarahkan oleh negara dapat digunakan sebagai alat untuk menembus proteksionisme regulasi dan memperdalam pengaruh secara signifikan.

Mekanisme pembiayaan juga menjadi instrumen kunci. Meskipun sulit untuk melacak setiap pinjaman untuk proyek digital, model pembiayaan Tiongkok terlihat jelas dalam proyek *Belt and Road Initiative Program* Andalannya di Indonesia, Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Proyek ini didanai secara mayoritas oleh pinjaman dari China Development Bank (CDB) (Nabiilah and Sari 2024, 307). Model ini, di mana pembiayaan besar disediakan dengan syarat penggunaan teknologi, material, dan kontraktor dari Tiongkok, menjadi cetak biru yang juga ditawarkan untuk proyek-proyek infrastruktur digital. Dengan menawarkan paket "pembiayaan-plus-konstruksi" yang terintegrasi, Tiongkok mengurangi beban finansial awal bagi Indonesia, namun sebagai imbalannya, Indonesia terikat pada ekosistem Tiongkok selama siklus hidup proyek tersebut. Menjadikan upaya yang dilakukan Tiongkok sebagai bentuk bujukan dalam bentuk ekosistem bisnis dan pemerintah Indonesia dengan menawarkan modal, teknologi, dan solusi atas tantangan regulasi. sebagai imbalannya Tiongkok memiliki kontrol atas aset-aset digital paling strategis di Indonesia.

3.3. Instrumen 4: Siber

Sebagai instrumen yang relatif baru, dunia maya telah menjadi arena penting bagi persaingan geoekonomi. Indikator utamanya adalah serangan siber yang disponsori oleh negara, yang tidak hanya menargetkan instalasi militer, tetapi juga infrastruktur ekonomi kritis seperti sistem perbankan, pasar saham, jaringan listrik, dan pusat logistik. Selain itu, pencurian kekayaan intelektual dan

data komersial strategis secara masif dari perusahaan-perusahaan di negara pesaing juga merupakan bentuk serangan geoekonomi. hal ini ditujukan untuk melemahkan keunggulan kompetitif ekonomi negara sasaran, menciptakan ketidakpastian, dan memberikan tekanan geopolitik tanpa harus melakukan konfrontasi fisik (Blackwill & Harris, 2016, hlm. 59-68).

Instrumen siber dalam geoekonomi memiliki dua sisi: ofensif (serangan siber, spionase) dan struktural. Sisi struktural, yang lebih relevan dalam konteks DSR, melibatkan upaya untuk membentuk arsitektur, norma, dan praktik tata kelola di ruang siber negara mitra agar sejalan dengan kepentingan negara asal. Tiongkok diterapkan secara halus dan struktural, berfokus pada upaya untuk membentuk arsitektur, norma, dan praktik tata kelola di ruang siber yang sejalan dengan kepentingannya. Melalui ekspor solusi "*Smart City*" dan "*Safe City*" oleh perusahaan seperti Huawei dan Hikvision, Tiongkok tidak hanya menjual kamera dan sensor, tetapi juga platform analitik dan model tata kelola data yang terpusat. Solusi-solusi ini seringkali datang dengan algoritma dan platform perangkat lunak yang merupakan "kotak hitam", di mana pengguna akhir memiliki sedikit visibilitas atau kontrol atas cara data diproses dan dianalisis pada Oktober 2023, Tiongkok meluncurkan "*Global AI Governance Initiative*" (Cyberspace Administration of China 2023).

Inisiatif ini dipromosikan melalui forum-forum *Digital Silk Road* Dan multilateral, merupakan upaya untuk menantang norma tata kelola digital yang dipimpin Barat (yang lebih menekankan pada pendekatan multi-stakeholder dan aliran data bebas) dan menawarkan model alternatif yang lebih menarik bagi negara-negara yang juga ingin meningkatkan kontrol atas ruang digital mereka.

Dengan menawarkan model tata kelola “*top-down*” yang memberikan kontrol lebih besar kepada negara, Tiongkok menarik simpati dari pemerintah di banyak negara berkembang yang khawatir tentang pengaruh perusahaan teknologi besar dari Barat dan penyebaran konten yang dianggap subversif. Tiongkok menerapkan instrumen ini secara halus di Indonesia. Hal ini terlihat dari ekspor infrastruktur dengan potensi *dual-use*, seperti pembangunan infrastruktur 5G oleh Huawei dan ZTE. Meskipun diklaim murni komersial, undang-undang keamanan nasional Tiongkok mewajibkan perusahaan untuk bekerja sama dengan intelijen negara, menciptakan risiko keamanan jangka panjang. Tiongkok juga melakukan promosi norma tata kelola *internet* melalui forum seperti *World Internet Conference*, di mana konsep "kedaulatan siber" secara konsisten dipromosikan kepada pejabat Indonesia untuk mendorong pergeseran norma global menuju kontrol negara yang lebih besar (World Internet Conference 2024). Lebih konkret lagi, kerja sama keamanan siber melalui MoU antara BSSN Indonesia dan mitranya di Tiongkok, di satu sisi merupakan transfer pengetahuan, namun di sisi lain memberikan Tiongkok wawasan mendalam tentang arsitektur dan kerentanan keamanan siber Indonesia (T et al. 2024). Secara bertahap Tiongkok "*inducement*" lembaga pemerintah di negara mitra untuk mengadopsi praktik pengawasan dan pengumpulan data yang sejalan dengan model Tiongkok. Di tingkat kebijakan global, Tiongkok secara aktif mempromosikan visinya tentang kedaulatan siber (*cyber sovereignty*), yang menekankan hak mutlak negara untuk mengontrol *internet* di dalam wilayahnya.

3.4. Instrumen 5: Kekuatan Bantuan dan Pembangunan Kapasitas

Bantuan dan pembangunan mencakup bantuan pembangunan, militer, dan kemanusiaan, sering kali digunakan sebagai alat untuk "membeli" pengaruh dan loyalitas. Variabel kunci dari instrumen ini adalah jumlah bantuan, syarat-syarat yang melekat padanya (*conditionality*), dan penargetan strategisnya. Sebuah negara dapat menawarkan paket bantuan yang besar kepada negara berkembang dengan syarat negara tersebut mendukung posisinya di forum internasional, memberikan akses pangkalan militer, atau mengadopsi kebijakan domestik tertentu. Bantuan juga dapat digunakan untuk menopang rezim yang bersahabat atau, sebaliknya, ditahan untuk menekan pemerintah yang dianggap tidak sejalan (Blackwill & Harris, 2016, hlm. 68-74).

Pemerintah Tiongkok, yang dieksekusi melalui perusahaan juaranya, secara ekstensif menawarkan program pembangunan kapasitas. Instrumen ini adalah wajah "lembut" dari geoekonomi Tiongkok, di mana "bantuan" dalam bentuk pembangunan kapasitas digunakan untuk membangun *soft power*, keahlian teknis, dan loyalitas jangka panjang terhadap teknologinya. Program andalannya adalah "*Huawei ASEAN Academy*" di Indonesia, yang per 2023 telah menargetkan untuk melatih 100.000 talenta digital Indonesia dalam lima tahun. Program ini berjalan melalui kemitraan dengan lebih dari 90 universitas terkemuka di Indonesia, termasuk ITB, UGM, dan UI (Indonesia Enterprise Partner Development Mgmt Dept, Huawei 2023). Di permukaan, ini adalah "dukungan" murni untuk mengatasi kesenjangan talenta digital. Namun, analisis geoekonomi menunjukkan ini adalah bentuk "persuasi" jangka panjang. Program ini melatih puluhan ribu mahasiswa dan profesional Indonesia menggunakan perangkat dan

kurikulum Huawei. Kurikulum ini tidak hanya mencakup keterampilan teknis tetapi juga memperkenalkan standar dan filosofi desain teknologi Huawei, yang secara halus membentuk preferensi para peserta. Ini menciptakan generasi talenta digital masa depan yang secara alami lebih familier, lebih nyaman, dan lebih memilih teknologi Tiongkok, sebuah fenomena yang disebut "ketergantungan ekologis". Demikian pula, pemerintah Tiongkok secara konsisten menjadi salah satu penyedia beasiswa asing terbesar bagi mahasiswa Indonesia, dengan fokus kuat pada bidang STEM. Ini tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menanamkan pemahaman dan afinitas di kalangan calon pemimpin masa depan Indonesia terhadap model pembangunan Tiongkok. Ketika para alumni ini kembali ke Indonesia dan menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan atau industri, mereka cenderung memiliki pandangan yang lebih positif dan reseptif terhadap kerja sama dengan Tiongkok. Pendekatan ini menunjukkan kombinasi dari dukungan (*support*) dan bujukan (*inducement*). Di permukaan, ini adalah *support* yang tulus untuk membantu Indonesia mengatasi kesenjangan talenta digitalnya. Namun, pada tingkat strategis, ini adalah *inducement* yang canggih, dirancang untuk "membujuk" ekosistem talenta Indonesia agar selaras dan bergantung pada teknologi dan standar Tiongkok dalam jangka panjang.

3.5. Instrumen 6: Keuangan dan Moneter

Instrumen keuangan dan moneter dalam geoekonomi mencakup serangkaian tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan pengaruh suatu negara melalui sistem keuangan global. Ini tidak hanya terbatas pada manipulasi mata uang, tetapi juga mencakup promosi penggunaan mata uang sendiri dalam perdagangan dan investasi internasional untuk mengurangi dominasi mata uang lain (seperti Dolar AS), serta penyediaan pembiayaan proyek strategis melalui bank kebijakan negara (*state policy banks*) yang seringkali datang dengan persyaratan yang mengikat negara penerima pada ekosistem ekonomi dan teknologi negara pemberi (Blackwill & Harris, 2017). Terdapat dua jalur utama yaitu penyediaan pembiayaan proyek berskala besar yang seringkali datang dengan persyaratan mengikat, dan promosi penggunaan mata uangnya untuk mengurangi hegemoni Dolar AS. Pertama, di sisi pembiayaan, model Tiongkok terlihat jelas dalam proyek andalan *Belt and Road Initiative Program* Di Indonesia, Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Proyek ini mayoritas didanai oleh pinjaman dari *China Development Bank* (CDB), sebuah bank kebijakan negara (Nabiilah and Sari 2024). Model ini, di mana pembiayaan besar disediakan dengan syarat penggunaan teknologi, material, dan kontraktor dari Tiongkok, menjadi cetak biru yang juga ditawarkan untuk proyek-proyek infrastruktur DSR. Dengan menawarkan paket "teknologi plus pembiayaan" yang sulit ditandingi oleh lembaga keuangan Barat, Tiongkok "*inducement*" negara mitra untuk menerima keseluruhan ekosistemnya, yang pada gilirannya menciptakan ketergantungan finansial dan teknis (*lock-in effect*). Skema ini sering disebut sebagai "*debt-trap diplomacy*" oleh para kritikus, meskipun pemerintah Tiongkok

menolaknyanya. Terlepas dari terminologinya, hasilnya adalah peningkatan utang negara mitra kepada Tiongkok, yang dapat diterjemahkan menjadi pengaruh politik di masa depan.

Kedua, di sisi moneter, Tiongkok secara aktif mendorong de-dolarisasi. Pada Agustus 2022, Bank Indonesia (BI) dan *People's Bank of China* (PBoC) mengumumkan perluasan kerangka kerja sama *Local Currency Settlement* (LCS). Kebijakan ini memungkinkan eksportir dan importir kedua negara untuk melakukan transaksi menggunakan mata uang lokal (Rupiah dan Yuan), tanpa perlu konversi ke Dolar AS (Bank Indonesia 2021). Meskipun di permukaan ini adalah langkah efisiensi, secara geoekonomi ini adalah langkah strategis Tiongkok untuk meningkatkan peran internasional Yuan dan mengurangi dominasi Dolar AS di kawasan. Setiap transaksi yang beralih dari Dolar ke Yuan/Rupiah adalah kemenangan kecil bagi Tiongkok dalam kompetisi mata uang global jangka panjang. Dengan memfasilitasi transaksi dalam mata uang lokal, Tiongkok "membujuk" Indonesia untuk lebih dalam terintegrasi ke dalam sistem finansialnya. Langkah selanjutnya yang potensial adalah integrasi sistem pembayaran ritel, seperti menghubungkan QRIS Indonesia dengan Alipay dan WeChat Pay, yang akan semakin memperkuat jangkauan ekosistem finansial digital Tiongkok di Indonesia.

**Tabel 3.1. Operasionalisasi Instrumen Geoekonomi Blackwill & Harris
dalam Konteks DSR**

Instrumen Geoekonomi	Definisi Operasional dalam Konteks Digital Silk Road Tiongkok di Indonesia
Kebijakan Perdagangan & Standar	<p>Upaya pemerintah Tiongkok mendorong ekspor perangkat keras (Huawei dan ZTE) dan perangkat lunak (TikTok, aplikasi pembayaran) yang disertai dengan promosi adopsi standar teknis Tiongkok untuk <i>5G, AI, cloud computing</i>, dan <i>e-commerce</i>.</p>
Kebijakan Investasi Strategis	<p>Pengarahannya investasi dari entitas yang terafiliasi dengan negara (BUMN, <i>sovereign wealth funds</i>, dan <i>national champions</i>) untuk membangun dan menguasai infrastruktur digital krusial (<i>data center</i>, kabel optik) dan platform digital strategis di Indonesia.</p>
Kebijakan Keuangan & Pembiayaan	<p>Penggunaan bank-bank kebijakan (China Development Bank, China Exim Bank) untuk menyediakan pembiayaan proyek infrastruktur digital yang mengikat Indonesia pada kontraktor, teknologi, dan ekosistem keuangan Tiongkok.</p>

<p>Bantuan & Pembangunan Kapasitas</p>	<p>Penawaran program beasiswa, pelatihan talenta digital, dan lokakarya teknologi (<i>Huawei ICT Academy</i>) untuk menciptakan tenaga kerja yang familiar dengan teknologi Tiongkok dan pejabat yang reseptif terhadap model tata kelola digital Tiongkok.</p>
<p>Instrumen Siber & Tata Kelola Data</p>	<p>Upaya untuk membentuk norma dan praktik tata kelola data di Indonesia melalui penyediaan solusi teknologi (<i>Smart City, cloud services</i>) yang berpotensi memberikan akses terhadap aliran data strategis.</p>

BAB 4

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: "Bagaimana Upaya Pemerintah Tiongkok dalam Meningkatkan Ekonomi Digital di Indonesia melalui Kebijakan *Digital Silk Road* pada Tahun 2022-2024?" Berdasarkan analisis kontekstual pada Bab 2 dan analisis geoekonomi pada Bab 3, studi ini menemukan bahwa *Digital Silk Road Tidak* sekadar merupakan proyek ekonomi, tetapi representasi dari strategi negara Tiongkok untuk menanamkan pengaruh melalui kekuatan non-militer yang berbasis teknologi, investasi, dan standarisasi global. Pendekatan geoekonomi ini tidak hanya difungsikan sebagai alat pendukung pembangunan, melainkan sebagai sarana artikulasi kepentingan nasional Tiongkok dalam lanskap digital Asia Tenggara.

Hasil analisis menunjukkan bahwa *Digital Silk Road* yang dilaksanakan oleh pemerintah Tiongkok melalui tujuh instrumen utama geoekonomi yaitu Perdagangan, Investasi, Keuangan, Sanksi, Siber, Bantuan, dan Komoditas. Di Indonesia, instrumen-instrumen ini mewujud dalam bentuk pembangunan infrastruktur digital seperti pusat data dan backbone 5G, penyelenggaraan pelatihan digital oleh Huawei dan Alibaba untuk ribuan peserta lokal, serta penandatanganan nota kesepahaman teknologi yang memperkuat relasi bilateral. Kebijakan ini tidak berlangsung secara sporadis, melainkan terintegrasi dalam suatu rancangan diplomasi digital yang sistematis. Di balik retorika “kerja sama setara”, kebijakan *Digital Silk Road* Merefleksikan intensi Tiongkok untuk

merekonstruksi tata ekonomi digital regional, dengan Indonesia sebagai salah satu simpul pentingnya.

Di sisi lain, Indonesia memperoleh manfaat konkret dari keterlibatan dalam DSR, terutama dalam hal peningkatan nilai ekonomi digital yang tumbuh dari USD 70 miliar pada 2022 menjadi USD 88 miliar pada 2024, sebagaimana diperkuat oleh laporan Google–Temasek–Bain. Hal ini beriringan dengan peningkatan investasi Tiongkok yang mencapai USD 8,4 miliar di sektor digital Indonesia pada 2023. Namun, intensitas kerja sama tersebut tidak serta-merta bebas risiko. Penelitian ini mengidentifikasi adanya *asymmetric interdependence* yang melekat dalam hubungan kedua negara. Keterlibatan ini, meskipun memberikan manfaat jangka pendek, secara bertahap mengikat Indonesia pada standar, modal, dan teknologi Tiongkok, yang menyoroti dilema strategis antara kedaulatan digital dan percepatan pembangunan. Kapabilitas teknologi Tiongkok berpotensi mendominasi ekosistem digital Indonesia jika tidak diimbangi oleh kebijakan nasional yang kuat terkait kedaulatan data, interoperabilitas sistem, dan perlindungan konsumen digital.

Respons pragmatis Indonesia yang didorong oleh kebutuhan akselerasi ekonomi digital telah menghasilkan pertumbuhan signifikan, namun secara bersamaan menciptakan dinamika ketergantungan asimetris. Lebih jauh, pendekatan Tiongkok terhadap Indonesia dalam konteks *Digital Silk Road* tidak bersifat koersif, melainkan persuasive. Strategi ini mencerminkan transformasi diplomasi global di mana ekspansi pengaruh tidak lagi dilakukan melalui tekanan ekonomi konvensional, tetapi melalui pembentukan *digital dependency* secara

halus dan bertahap. Dengan melibatkan aktor-aktor seperti promosi standar teknologi 5G oleh Huawei, serta program pelatihan talenta digital yang menciptakan ketergantungan ekologis., investasi masif pada infrastruktur kritis seperti pusat data oleh Alibaba Cloud, dan manuver akuisisi strategis oleh ByteDance terhadap Tokopedia, yang secara ideologis dan institusional terhubung dengan kebijakan luar negeri Tiongkok, negara tersebut menjalankan *economic statecraft* dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Artikulasi ini tidak hanya menjelaskan dinamika hubungan Indonesia–Tiongkok, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kekuatan negara saat ini dikonstruksi melalui kontrol atas infrastruktur digital dan informasi.

Dengan menggunakan Geoekonomi sebagai instrumen yang terukur Analisis menggunakan kerangka *War by Other Means* menunjukkan bahwa Tiongkok secara mahir menggunakan kebijakan investasi sebagai ujung tombak, diikuti oleh kekuatan siber dan perdagangan untuk menciptakan ketergantungan teknis dan pasar, serta diperhalus dengan instrumen persuasi untuk membangun *soft power*. Fenomena ini menegaskan bahwa dalam konteks DSR, Tiongkok mempraktikkan seni kenegaraan (*statecraft*) di mana batas antara ekonomi dan geopolitik menjadi kabur sehingga memerlukan kemampuan mengontrol dan membentuk arsitektur digital internasional

4.2 REKOMENDASI

Penelitian yang dilakukan mengenai kerja sama ekonomi digital Tiongkok dan Indonesia dalam kerangka kebijakan *Digital Silk Road* menggunakan Teori *Geoeconomy* menghasilkan temuan berupa kebijakan negara dapat ditinjau menggunakan konsep tersebut. Penelitian ini berfokus pada tingkat nasional. Celah penelitian selanjutnya adalah mengkaji bagaimana implementasi *Digital Silk Road* (misalnya, pembangunan pusat data atau penetrasi *e-commerce*) berdampak pada ekonomi lokal, UMKM, dan pasar tenaga kerja di daerah-daerah spesifik di Indonesia. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan terhadap fokusnya pada aktor negara dan korporasi besar. Penelitian di masa depan dapat mengisi celah ini dengan menganalisis peran masyarakat sipil, kelompok advokasi hak digital, dan akademisi di Indonesia dalam membentuk narasi dan perlawanan (jika ada) terhadap meningkatnya pengaruh digital Tiongkok.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Syaiful, and Ristiyani Ristiyani. 2018. "Kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok pada Masa Pemerintahan Xi Jinping." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 14 (2): 217–36.
<https://doi.org/10.26593/jihi.v14i2.2842.217-236>.
- Fatmawati, Inma. 2015. "ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA DENGAN MODEL SOLOW DAN MODEL SCHUMPETER," 1.
- Harjadi, D. W., and A. N. Hidayanto. 2018. "Exploring Factors Affecting the Intention to Use Social Commerce for Online Shopping." *International Journal of Tchnology* 9 (6): 1256–65.
- INDONESIA.GO.ID. 2023. "Indonesia.Go.Id - Indonesia Accounts for 40% Digital Transaction Value in ASEAN." July 2023.
<https://indonesia.go.id/kategori/asean-2023-variety/7264/indonesia-accounts-for-40-digital-transaction-value-in-asean?lang=2>.
- KOMINFO, PDSI. 2021. "Ekonomi Digital Indonesia Berpotensi Tumbuh Hingga Delapan Kali Lipat di 2030." Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. 2021.
<http://content/detail/34996/ekonomi-digital-indonesia-berpotensi-tumbuh-hingga-delapan-kalilipat-di-2030/0/berita>.
- Radita Gora Tayibnapis, Muhammad Abdurrohim. 2022. "China Digital Silk Road And Indonesia Digital Transformation." *Jurnal Mandala Jurnal Ilmu*

Hubungan Internasional, December, 209–30.
<https://doi.org/10.33822/mjihi.v5i2.5047>.

Rakhmat, Zulfikar. 2022. “China’s Digital Silk Road in Indonesia: Progress and Implications.”

Sapulette, Militcyano Samuel, and Pyan A Muchtar. 2023. “Redefining Indonesia’s Digital Economy.”

Alviansyah Pasaribu. 2023. “China umumkan rencana pengembangan infrastruktur daya komputasi.”

China Internet Network Information Center. 2024. “CNNIC Releases the 54th Statistical Report on China’s Internet Development.”

Cyberspace Administration of China. 2023. “Digital China Development Report (2022).” https://www.cac.gov.cn/2023-05/26/c_1686747704091097.htm.

Florian Hoppe, Aadarsh Baijal, Willy Chang, Sapna Chadna, and Fock W. Hong. 2023. “e-Conomy SEA 2023.” Brain & Company.
<https://www.bain.com/insights/e-conomy-sea-2023/>.

Goodman, Matthew P. 2019. “China’s Digital Silk Road.” Center for Strategic & International Studies.
<https://www.csis.org/analysis/chinas-digital-silk-road>.

GovTech. 2022. “Literasi Keamanan Informasi dalam UU PDP.” GovTech Kantor Staf Presiden.
<https://govtech.ksp.go.id/literasi-keamanan-informasi-dalam-uu-pdp.html>.

Hillman, Jonathan E. 2021. *The Digital Silk Road: China’s Quest to Wire the World and Win the Future*. N.p.: Profile.

- Jane Cai. 2024. "China highlights data and "Digital Silk Road" in new plan to drive innovation as US tech rivalry intensifies."
- Joshua Kurlantzick. 2020. "China's Digital Silk Road Initiative | The Tech Arm of the Belt and Road Initiative." Council on Foreign Relations.
<https://www.cfr.org/china-digital-silk-road/>.
- Lin Yang. 2024. "China's Digital Silk Road exports internet technology, controls."
- Rajeshwari Krishnamurthy, and Richard Ghiasy. 2021. "China's Digital Silk Road and the Global Digital Order." The Diplomat – Asia-Pacific Current Affairs Magazine.
<https://thediplomat.com/2021/04/chinas-digital-silk-road-and-the-global-digital-order/>.
- Sayekti, Ignatia M. 2022. "Siapkan Infrastruktur 5G di IKN, Menkominfo Jajaki Kerja Sama Global dengan Huawei." PressRelease.id.
<https://pressrelease.kontan.co.id/news/siapkan-infrastruktur-5g-di-ikn-menkominfo-jajaki-kerja-sama-global-dengan-huawei>.
- Vivek Chilukuri, and Ruby Scanlon. 2025. "Countering the Digital Silk Road: Indonesia." Center for a New American Security.
<https://www.cnas.org/publications/reports/countering-the-digital-silk-road-indonesia>.
- Xinhua Institute. 2024. "'Green', 'digital' become key themes in the new phase of Belt and Road Initiative Program Development."
- Xinhua Institute. 2025. "Nilai tambah ekonomi digital Beijing capai 2 triliun yuan pada 2024."

- Ananda Teresia. 2023. "TikTok set to restart e-commerce in Indonesia with \$1.5 billion Tokopedia investment." reuters. <https://www.reuters.com/markets/deals/tiktok-invest-15-bln-indonesias-got-o-2023-12-11/>.
- Bank Indonesia. 2021. "Indonesia - Tiongkok Memulai Implementasi Penyelesaian Transaksi Bilateral dengan Mata Uang Lokal (Local Currency Settlement)." Bank Indonesia. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2322721.aspx.
- Blackwill, Robert D., and Jennifer M. Harris. 2017. *War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft*. N.p.: Harvard University Press.
- Cyberspace Administration of China. 2023. "China: CAC proposes Global AI Governance Initiative." Data Guidance. <https://www.dataguidance.com/news/china-cac-proposes-global-ai-governance-initiative>.
- Indonesia Enterprise Partner Development Mgmt Dept, Huawei. 2023. "Developing Digital Talent to Bridge the Demand-Supply Gap in Indonesia." HUAWEI TECH 2023 Issue 03. <https://www.huawei.com/en/news/2021/11/asia-pacific-innovation-day-talent-2021>.
- Josa Lukman. 2024. "Indosat Ooredoo Hutchison, Huawei join forces for AI-driven innovation, talent empowerment." The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com/business/2024/02/27/indosat-ooredoo-hutchison-huawei-join-forces-for-ai-driven-innovation-talent-empowerment.ht>

ml.

Li, President. 2025. "Indonesia, China Ink Deals to Boost Local Currency Use."

AInvest.

<https://www.ainvest.com/news/indonesia-china-ink-deals-boost-local-currency-2505/>.

Nabilah, Rifia A., and Deasy S. Sari. 2024. "China's Debt Trap in Indonesia: A Case Study of the Jakarta-Bandung High-Speed Rail Project." *ILOMATA INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE* 5, no. 1 (Januari): 307.

Sayekti, Ignita M. 2022. "Siapkan Infrastruktur 5G di IKN, Menkominfo Jajaki Kerja Sama Global dengan Huawei." [Pressrelease.id](https://pressrelease.kontan.co.id/news/siapkan-infrastruktur-5g-di-ikn-menkominfo-jajaki-kerja-sama-global-dengan-huawei).
<https://pressrelease.kontan.co.id/news/siapkan-infrastruktur-5g-di-ikn-menkominfo-jajaki-kerja-sama-global-dengan-huawei>.

stillmen. 2021. "Alibaba Cloud to Launch Third Data Center in Indonesia in Early 2021." PT Sisnet Mitra Sejahtera. <https://ptsms.co.id/alibaba-indonesia/>.

Chilukuri, Vivek, and Ruby Scanlon. 2025. "Countering the Digital Silk Road: Indonesia." CNAS.
<https://www.cnas.org/publications/reports/countering-the-digital-silk-road-indonesia>.

Gunter, Jacob, and Rebecca Arcesti. 2024. "The Digital Silk Road: A growing priority for Beijing as its tech champions expand overseas." Mercator Institute for China Studies (MERICS).
<https://merics.org/en/tracker/digital-silk-road-growing-priority-beijing-its-tech-champions-expand-overseas>.

Shambaugh, David. 2013. *China Goes Global: The Partial Power*. N.p.: OUP USA.

Chilukuri, Vivek, and Ruby Scanlon. 2025. "Countering the Digital Silk Road: Indonesia." CNAS.
<https://www.cnas.org/publications/reports/countering-the-digital-silk-road-indonesia>.

Gunter, Jacob, and Rebecca Arcesti. 2024. "The Digital Silk Road: A growing priority for Beijing as its tech champions expand overseas." Mercator Institute for China Studies (MERICS).
<https://merics.org/en/tracker/digital-silk-road-growing-priority-beijing-its-tech-champions-expand-overseas>.

Kate Hannan, and Stewart Firth. 2015. "Trading with the Dragon : Chinese trade, investment and development assistance in the Pacific Islands." *Journal of Contemporary China* 24 (95).
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10670564.2015.1013377?scroll=top&needAccess=true>.

Lebang, Christian G., Gatra Priyandita, and Trissia Wijaya. 2023. *TRANSFORMASI DIGITAL INDONESIA Kondisi Terkini dan Proyeksi*. N.p.: LABORATORIUM INDONESIA 2045.

Muhammad Zulham. 2021. "The Importance of Belt and Road Initiatives for Indonesia in Realizing the Global Maritime Fulcrum." *Jurnal Maritim Indonesia* 9 (3).
<https://jurnalmaritim.tnial.mil.id/index.php/IMJ/article/view/93/69>.

Shambaugh, David. 2013. *China Goes Global: The Partial Power*. N.p.: OUP
USA.

T, Helga F., Jonni Mahroza, Yoedhi Swastanto, and Robby M. T. 2024.
*KERJASAMA INDONESIA-TIONGKOK DALAM MEMBANGUN CYBER
SECURITY*. N.p.: Penerbit Widina Media Utama.

Tayibnapi, Radita G. 2022. "China Digital Silk Road and Indonesia Digital
Transformation." *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 5 (2).
<https://doi.org/10.33822/mjihi.v5i2.5047>.

World Internet Conference. 2024. "Sovereignty in Cyberspace: Theory and
Practice (Version 4.0)." World Internet Conference.
https://www.wicinternet.org/2024-01/16/c_956165.htm.